



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PERHUBUNGAN



- LAKIP -



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Kata Pengantar	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021	6
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA	8
B. ANALISIS KINERJA	9
C. REALISASI ANGGARAN	19
D. ANALISIS EFISIENSI	19
BAB IV PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021	6
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019	7
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019	8
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2019	19
Tabel 3.3	Analisis Efisiensi	19

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja/ LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENGKALIS**

DJOKO EDY IMHAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19680329 199002 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2019, merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, yang pelaksanaan program kegiatannya dilaksanakan selama 12 bulan, sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan suatu realisasi pelaksanaan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur dalam rangka penyelenggaraan “good governance”. Pada dasarnya, bahwa kinerja Dinas merupakan suatu *action plan* dalam rangka merealisasikan visi Dinas yang telah ditetapkan, yaitu: “Terwujudnya Sistem Transportasi Kabupaten Bengkalis yang Handal dalam mendukung Sistem Transportasi Wilayah dan Nasional”.

Dalam menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bengkalis, Dinas Perhubungan telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan sektor Perhubungan berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis yang dalam hal ini telah dirumuskan berbentuk Rencana Strategis (Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021) dengan Tujuan Pembangunan Sektor Perhubungan di Kabupaten Bengkalis yang mendukung kinerja dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan (2016 – 2021) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan Transportasi Umum;
2. Meningkatkan akses Transportasi antar Daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Transportasi;
4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan

Dari tujuan tersebut pada tahun 2019 dapat ditetapkan Sasaran Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai penjabaran tujuan secara kuantitatif yaitu :

1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut dengan 1 (Satu) Indikator Kinerja yaitu :

- a) Persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut dengan target 20%.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana Transportasi yang terpadu antar daerah dengan 3 (Tiga) Indikator kinerja yaitu :
 - a) Persentase desa yang terlayani angkutan umum layak jalan/layar dengan target 50%.
 - b) Jumlah Pelabuhan/Udara/terminal dengan target 92 unit.
 - c) Persentase peningkatana arus penumpang dan barang antar wilayah dengan target 2%
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Transportasi dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi dengan target nilai 80.
4. Meningkatnya kualitas capaian Kinerja dengan 2 (Dua) indikator kinerja yaitu :
 - a) Predikat Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai B.
 - b) Hasil Persentase tindaklanjut pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat/ BPK dengan target 100%.

Sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melaksanakan program/ kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bengkalis dengan Jumlah kegiatan sebanyak 55 (Lima puluh lima) kegiatan dan 9 (sembilan) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.222.212.472,- terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 38.185.706.692,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.224.066.925,08,- atau 76.53 % dan alokasi anggaran belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 14.036.505.780,- dengan realisasinya sebesar Rp. 12.977.498.621,- atau 92,46%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab, termasuk penataan perangkat Daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi Daerah guna melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis terletak pada salah satu pulau yang berada diwilayah timur Propinsi Riau adalah satu diantara 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang merupakan Kabupaten induk setelah beberapa kali dilakukan pemekaran sesuai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, serta Kota Madya Dumai, dan pada tahun 2009 dilakukan pemekaran lagi dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti .

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibidang Perhubungan (transportasi), perlu memfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia***". Oleh karena itu, dalam rangka menilai

sejauh mana capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang berhasil diperoleh, maka capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada *user* atau *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehubungan akan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan R B No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melaporkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholdes. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Perhubungan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di jalan Pramuka Bengkalis, adalah Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perhubungan (Sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi), yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selain sebagai abdi negara juga sebagai abdi masyarakat, antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan dan pembangunan juga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas untuk masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mengupayakan agar prosedur pengerahan sumber daya yang meliputi sistem manajemen, sarana/fasilitas dan tenaga personil dapat ditingkatkan dengan lebih baik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan, teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup Perhubungan yang bersifat teknis dan fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.
- e. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (Empat) Bidang dan 8 UPT Teknis sebagai berikut :

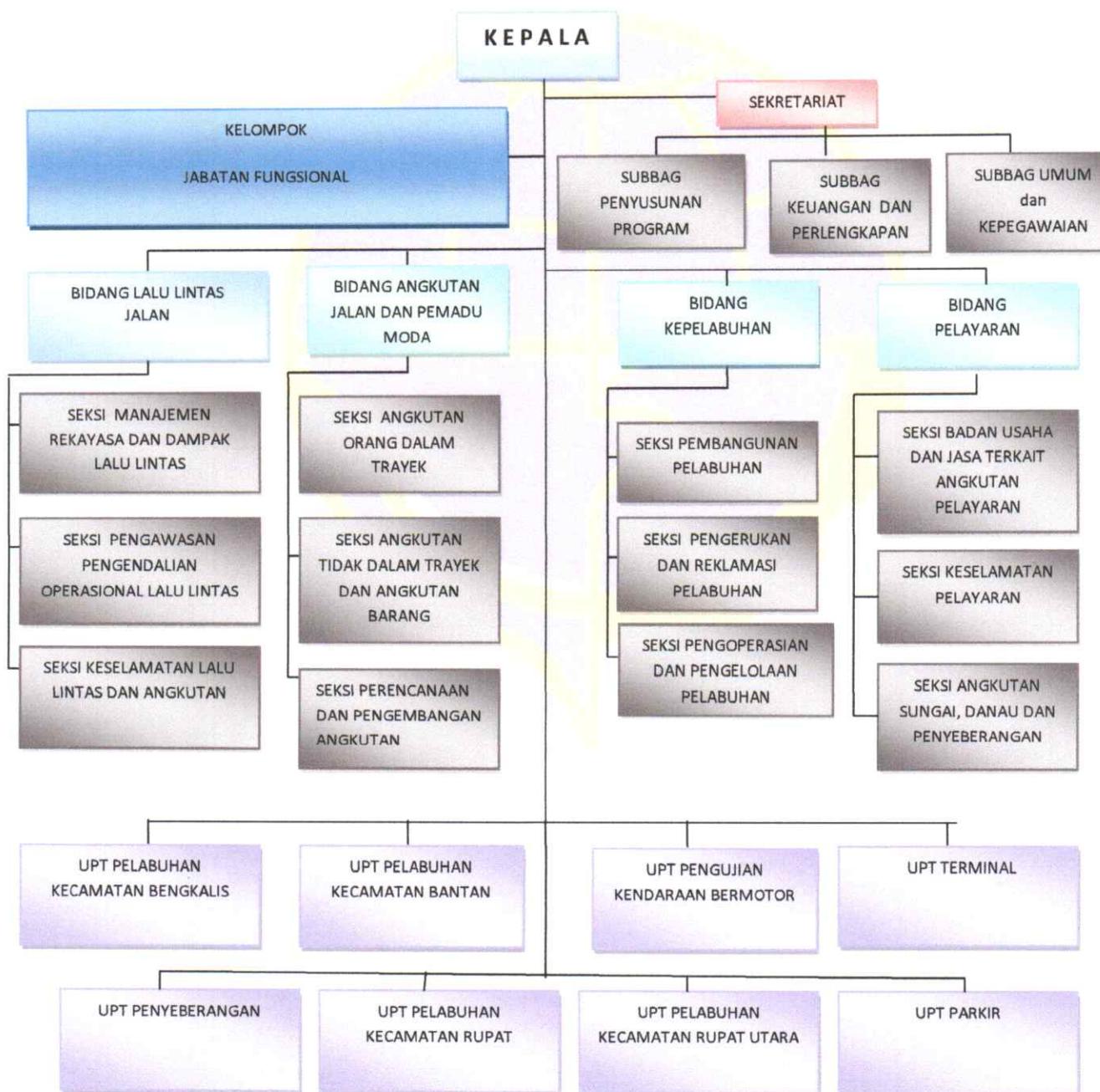
1. **Sekretariat**, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. **Bidang Lalu Lintas Jalan**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi meliputi rekayasa dan dampak lalu lintas, operasional jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. **Bidang Angkutan dan Pemadu Moda**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi meliputi angkutan orang dalam trayek dan Terminal, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang dan perencanaan serta pengembangan angkutan;
4. **Bidang Kepelabuhan**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi meliputi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan serta pengoperasian dan pengelolaan Pelabuhan;
5. **Bidang Pelayaran**, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi meliputi Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan pelayaran, Keselamatan Pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KABUPATEN BENGKALIS

Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis

Nomor : 50 Tahun 2016

Tgl : 30 November 2016



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Tabel 2.1
Rencana Strategis

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut.	Persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut	n/a	n/a	n/a	20	30	40
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang terpadu antar daerah	Prosentase desa yang terlayani angkutan umum layak jalan/layar	29	36	45	50	56	80
	Jumlah Pelabuhan laut/Udara/ Terminal	86	88	90	92	94	95
	Persentase peningkatan arus penumpang dan barang antar wilayah	n/a	n/a	n/a	2	4	5
Meningkatnya Kualitas pelayanan Transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi.	n/a	65	70	80	82	85
Meningkatnya kualitas Capaian Kinerja.	Predikat Akuntabilitas kinerja	Cc	Cc	B	B	BB	BB
	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan inspektorat/BPK	100	100	100	100	100	100

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut.	Persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut	20
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang terpadu antar daerah	Prosentase desa yang terlayani angkutan umum layak jalan/layar	50
		Jumlah Pelabuhan/ Udara/ Terminal.	92
		Persentase peningkatan arus penumpang dan barang antar wilayah	2
3.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi.	80
4.	Meningkatnya kualitas Capaian Kinerja.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat/ BPK	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut.	- Persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut	20%	4%	20%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang terpadu antar daerah	- Prosentase desa yang terlayani angkutan umum layak jalan/layar	50%	47,62%	95,24%
		- Jumlah Pelabuhan/ Udara/ Terminal.	92	98	106,5%
		- Persentase peningkatan arus penumpang dan barang antar wilayah	2%	9,54%	476%
3.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Transportasi	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi.	80	80,19	100,2%
4.	Meningkatnya kualitas Capaian Kinerja.	- Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		- Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat/ BPK	100	50,76	50,76%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 telah tercapai. Dari 7 indikator untuk 4 sasaran, 5 indikator dikatakan dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan, hanya 2 indikator yang capaiannya dibawah 90%. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

SASARAN 1

Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut.

Keselamatan dan kemandirian pelayanan transportasi merupakan salah satu tolak ukur perkembangan pembangunan di suatu daerah, dengan keselamatan dan kelancaran sistem transportasi menggambarkan tertibnya kondisi transportasi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat secara aman dan nyaman. Dengan tertibnya transportasi diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sampai dengan tahun 2019, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Indikator	2018	2019		Capaian 2019 terhadap 2021	
	capaian	Target	Realisasi		Capaian
Persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut		20%	4%	20%	10%%
Rata - rata capaian				20%	10%

1) Persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut

Mewujudkan keselamatan dan keamanan angkutan darat maupun laut merupakan tantangan yang harus di hadapi oleh Dinas Perhubungan selaku OPD yang menangani penyelenggaraan bidang transportasi, minimnya alat perlengkapan jalan serta minimnya pengetahuan pengguna jasa angkutan membuat masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas pada pengguna moda angkutan.

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menetapkan target persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut sebesar 20%, dan telah terealisasi sebesar 4% dengan capaian 20 %, hasil capaian ini sangat rendah hal ini disebabkan jumlah kecelakaan pada lalu lintas angkutan darat meningkat pada tahun 2019 ini yakni sekitar 120 Kasus.

Berikut grafik kasus kecelakaan angkutan umum selama periode 2016-2019 :



Sumber Data : Satlantas Polres Bengkalis

- a) Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas pada angkutan umum :
- Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengendara kendaraan bermotor tentang aturan berkendara dan berlalu lintas yang baik.
 - Masih kurangnya disiplin masyarakat pengguna kendaraan bermotor dalam mematuhi aturan lalu lintas dan rambu – rambu lalu lintas.
 - Masih kurangnya kesadaran para pengusaha angkutan umum dalam hal memenuhi syarat dalam menjalankan usaha angkutan umumnya seperti tidak melakukan uji kelayakan kendaraan (KIR) nya secara

rutin, sehingga terkadang banyak armada angkutan umum yang tetap dioperasikan walaupun tidak layak jalan.

- Masih banyak nya pelanggaran Over Dimension and Over Loading (ODOL) pada angkutan barang yang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam mengurangi tingkat kecelakaan angkutan umum serta meningkatkan keselamatan angkutan umum adalah :

- Meningkatkan program dan kegiatan pengadaan alat – alat perlengkapan jalan seperti rambu – rambu lalu lintas, pengadaan marka, pengadaan traffic light serta memelihara alat perlengkapan jalan yang sudah rusak guna mendukung keselamatan pengguna angkutan umum.
- Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap angkutan umum dan barang di jalan raya khususnya pada kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitasnya (ODOL),
- Selain itu Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi tentang ketertiban lalu lintas kepada masyarakat pengguna angkutan, baik itu pengusaha jasa angkutan maupun kepada masyarakat pengguna jasa angkutan.

SASARAN 2

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang terpadu antar daerah

Sarana transportasi merupakan urat nadi pembangunan bagi masyarakat suatu daerah, khusus daerah kabupaten Bengkalis yang memiliki wilayah kepulauan dan daratan sangat dibutuhkan sarana transportasi yang mampu menunjang mobilitas masyarakatnya terutama transportasi angkutan umum yang menghubungkan antar desa dengan ibu kota kecamatan ataupun yang menghubungkan desa dan kecamatan dengan ibu kota Kabupaten Bengkalis, saat ini transportasi angkutan umum di Kabupaten Bengkalis belum memadai baik itu dalam hal penyediaan sarana dan alat transportasinya maupun dukungan jaringan transportasi itu sendiri. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selaku

Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki wewenang dan fungsi sebagai penyedia Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Bengkalis akan terus berupaya meningkatkan penyediaan sarana transportasi bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Sampai dengan tahun 2019, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase desa yang terlayani angkutan umum layak jalan/layar	47,62%	50%	47,62%	95,24%	59,53%
Jumlah Pelabuhan /Udara/Terminal.	97	92	98	107,8%	103%
Persentase peningkatan arus penumpang dan barang antar wilayah		2%	9,5%	476%	190%
Rata - rata capaian				226,3%	117,5%

1) Persentase desa yang terlayani angkutan umum layak jalan/layar

Tersedianya angkutan umum berbasis massal merupakan salah satu penunjang terbukanya akses transportasi suatu Daerah, terlebih lagi bila daerah tersebut memiliki letak geografis wilayah yang luas dan terpisah-pisah seperti Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis wilayah daratan dan kepulauan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya mengembangkan sarana transportasi umum berbasis massal dengan menyediakan Bus Perintis maupun Bus Trans Perdesaan membuka akses transportasi ke daerah-daerah terisolir dan terpencil di wilayah Kabupaten Bengkalis. pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menargetkan jumlah persentase daerah yang terlayani oleh angkutan umum sebanyak 50% dan telah terealisasi sebesar 47,62%, realisasi ini tidak meningkat dari tahun lalu disebabkan beberapa hal diantaranya adalah :

- Tidak berjalannya kegiatan penyediaan Moda transportasi pedesaan yang dana kegiatannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat, yang mana output dari kegiatan ini adalah

pemberian moda transportasi darat berupa micro bus ke desa-desa yang masih belum terlayani angkutan umum dengan baik sehingga diharapkan kegiatan ini mampu mengatasi masalah tersebut.

- Tidak adanya perusahaan penyedia jasa transportasi angkutan umum yang mau melakukan pembukaan trayek baru di lokasi-lokasi atau daerah yang masih minim terlayani angkutan umum, di sebabkan minimnya informasi tentang permintaan transportasi umum di daerah tersebut.

dalam hal ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyediaan sarana transportasi bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis adalah dengan meningkatnya daerah – daerah di wilayah Kabupaten Bengkalis yang telah terlayani angkutan umum baik itu angkutan umum Perdesaan maupun angkutan umum perkotaan, hal ini dapat dilihat melalui jumlah desa – desa maupun kelurahan di Kabupaten Bengkalis yang telah dilayani oleh Angkutan umum, dalam hal ini pada tahun 2019 dari total jumlah 155 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis sebanyak 50 Desa maupun Kelurahan telah terlayani oleh Angkutan umum.



Solusi yang akan ditempuh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan jumlah desa yang bisa dilayani oleh angkutan umum baik itu moda darat maupun moda perairan adalah :

- Mengoptimalkan upaya agar terus memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang transportasi yang nantinya dapat di alokasikan untuk memenuhi target dalam penyediaan moda transportasi untuk pedesaan.

- Mengupayakan kerjasama/ kemitraan dengan penyedia moda transportasi masal seperti PERUM DAMRI guna membuka akses transportasi yang lebih terintegrasi.
- Melakukan kajian-kajian/survey tentang kebutuhan investasi transportasi masal yang terintegrasi di Kabupaten Bengkalis guna menggaet investor dari luar untuk mengembangkan transportasi masal yang terintegrasi di Kabupaten Bengkalis.

2) Jumlah Pelabuhan/Udara/Terminal.

Ketersediaan fasilitas sarana maupun prasarana seperti Pelabuhan dan terminal angkutan, baik itu Pelabuhan Rakyat, Pelabuhan Penyeberangan maupun Pelabuhan Umum serta terminal angkutan merupakan salah satu Faktor penunjang bagi kemudahan akses transportasi dan mobilitas masyarakat, dengan adanya kemudahan dalam hal akses transportasi maka akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi maupun sosial daerah tersebut, pemerintah kabupaten Bengkalis dalam hal ini terus berupaya mengembangkan Pelabuhan-pelabuhan, Dermaga rakyat serta Terminal Angkutan guna mendukung kelancaran sarana transportasi dan membuka akses baru bagi daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan menargetkan pembangunan Pelabuhan/Udara/ Terminal sebanyak 92 Unit yang terakumulasi dari jumlah pembangunan tahun sebelumnya dengan realisasi pembangunan sebanyak 98 Unit dengan capaian 106,5%. Jumlah pelabuhan maupun dermaga mengalami peningkatan jumlah dari realisasi tahun lalu yakni dari 97 menjadi 98 Unit.



3) Persentase peningkatan arus penumpang dan barang antar wilayah.

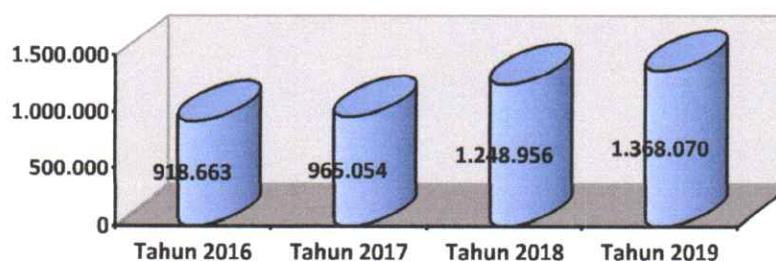
Kemudahan dalam melakukan mobilitas orang maupun barang merupakan salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh sarana maupun fasilitas transportasi. Dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang, pada angkutan umum darat dan laut dibutuhkan pembangunan serta peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan dalam pengelolaan transportasi angkutan umum di suatu daerah ialah dengan melihat arus pergerakan penumpang orang dan barang yang menggunakan angkutan umum baik itu angkutan darat maupun angkutan laut.

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan menargetkan persentase arus penumpang orang atau barang antar wilayah sebesar 2% dan telah terealisasi sebesar 9,5% dengan capaian 476%. Persentase arus penumpang ini dapat di hitung dengan melihat besaran peningkatan jumlah penumpang orang atau barang dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penumpang orang/barang tahun ini} - \text{Jumlah penumpang orang/barang tahun lalu}}{\text{Jumlah penumpang orang/barang tahun lalu}} \times 100$$

Pada tahun 2019 ini jumlah arus penumpang orang/barang antar wilayah dikabupaten bengkalis berjumlah 1.368.070 orang/barang, jumlah ini terus meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 1.248.956 orang/barang. keberhasilan peningkatan ini disebabkan dengan semakin baiknya pengelolaan transportasi baik itu peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung transportasi seperti terminal maupun pelabuhan maupun juga peningkatan kualitas moda transportasinya

Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan Umum dari tahun 2016-2019



SASARAN 3

Meningkatnya kualitas pelayanan Transportasi

Pelayanan prima dalam hal penyediaan sarana transportasi yang aman dan nyaman serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan jasa transportasi terus di upayakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Peningkatan pelayanan tersebut dibuktikan dengan upaya membangun fasilitas – fasilitas yang menunjang kemudahan masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi baik fasilitas di pelabuhannya maupun fasilitas pendukung lainnya.

Sampai dengan tahun 2019, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi.	73,89	80	80,19	100,2%	94,34%
Rata - rata capaian				100,2%	94,34%

1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi

Tingkat kepuasan masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi merupakan salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu instansi yang memberikan pelayanan jasa transportasi sebagai salah satu tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selaku OPD yang berwenang dalam hal penyediaan pelayanan jasa transportasi perlu melakukan Survey Kepuasan Masyarakat guna mengetahui dan mengukur sejauh mana keberhasilan strategi dan program – program pelayanan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pengguna jasa Pengujian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bathin Solapan, Survey Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim yang

melibatkan beberapa perangkat dan pejabat serta aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat pengguna jasa Pengujian Kendaraan Bermotor ini diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa Pengujian Kendaraan Bermotor 80,19 nilai ini telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yakni sebesar 80, dengan capaian kinerja 100,2%, hal ini membuktikan ada peningkatan yang cukup baik terhadap kepuasan masyarakat dalam menggunakan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.

SASARAN 4

Meningkatkannya kualitas capaian kinerja

Baik ataupun buruknya kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja suatu instansi pemerintah daerah, tidak terlepas dari kinerja dan kecakapan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan Program dan kegiatan yang telah dibuat dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan selaku OPD yang melayani masyarakat dalam bidang transportasi berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

Sampai dengan tahun 2019, capaian kinerja Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Akuntabilitas kinerja	B	B	B	100%	
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat/ BPK	51,96	100	50,76	50,76%	50,76%
Rata - rata capaian				75,38%	50,76%

1) Predikat Akuntabilitas Kinerja

Keberhasilan pengelolaan keuangan serta kinerja suatu OPD dapat dilihat dari laporan keuangan serta laporan kinerja OPD yang bersangkutan, penilaian ini diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) ataupun dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Provinsi, pemeriksaan tersebut menitikberatkan apakah OPD yang bersangkutan telah melakukan pengelolaan keuangan/anggaran dengan benar sesuai dengan prosedur atau peraturan yang berlaku. Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menargetkan memperoleh nilai B untuk nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas, dari hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Bengkalis terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis memperoleh nilai akuntabilitas B. Keberhasilan pencapaian target nilai akuntabilitas ini merupakan hasil upaya untuk memperbaiki Laporan Kinerja Akuntabilitas dengan memperbaiki segala lini dan menyelaraskan semua dokumen, di mulai perencanaan anggaran, pembuatan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan serta laporan-laporan lainnya yang mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas yang lebih baik.

2) Persentase tindak Lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat/BPK

Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dilakukan oleh pihak eksternal audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah dalam hal ini sistem akuntansi berbasis akrual. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selaku OPD yang menyelenggarakan urusan Perhubungan juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah..

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menargetkan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 50,76% dengan capaian sebesar 50,76%. Capaian kinerja yang di peroleh untuk indikator Sasaran ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan hal disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya tindak lanjut yang dilakukan oleh OPD terhadap temuan – temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 adalah sebesar Rp 29.224.066.925,08,- atau sebesar 76,53% dari pagu sebesar Rp. 38.185.706.692,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran ke tiga (3) yakni Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yaitu penyerapan anggarannya sebesar 98,02% dengan nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.956.988.760,00 dari target sebesar Rp. 3.016.800.000,00 Sementara penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran kedua (2) yakni meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang terpadu antar daerah yaitu 63,78%. Dengan nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.347.167.437,08 dari target sebesar Rp. 20.928.503.756,00. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran

Sasaran	Rata - rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut		6.926.288.900,-	6.403.929.444,-	92,46
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang terpadu antar daerah.		20.928.503.756,-	13.347.167.437,08,-	63,78
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi.		3.016.800.000,-	2.956.988.760,-	98,02
Meningkatnya kualitas capaian kinerja.		7.314.114.036,-	6.515.981.284,-	89,09
Total		38.185.706.692,-	29.224.066.925,08,-	76,53

D. Analisis Efisiensi

Terdapat dari 4 (empat) sasaran kinerja yang direncanakan, capaian kinerja indikator yang $\geq 100\%$ hanya terdapat 4 (empat) indikator yaitu jumlah pelabuhan/udara/terminal dengan capaian 106,5%, Persentase peningkatan arus penumpang dan barang antar wilayah dengan capaian 435%, Indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 100,2% serta Predikat Akuntabilitas Kinerja yang

diperoleh dari Inspektorat dengan Predikat "B" dengan capaian 100%, sehingga dapat di analisa bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut	20%	6.403.929.444,-	7,54
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang terpadu antar daerah.	212,7%	13.347.167.437,08,-	36,22
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi.	100,2%	2.956.988.760,-	1,98
4.	Meningkatnya kualitas capaian kinerja.	75,38%	6.515.981.284,-	10,91

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2019 yang tercermin pada indikator sasaran. Secara umum sasaran dan indikator kinerja telah memenuhi targetnya. Hal ini terlihat dari 7 indikator dengan 4 sasaran yang diperjanjikan, terdapat 5 indikator yang sesuai target bahkan melebihi target, sisanya hanya 2 indikator yang belum memenuhi target.

Faktor keberhasilan adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja sehingga koordinasi antara unit kerja semakin baik, diiringi dengan semakin membaiknya kualitas pelaksanaan kegiatan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan memenuhi indikator kinerja yang belum mencapai target maka akan di tindaklanjuti ditahun yang akan datang , beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan proses lelang kegiatan di ULP sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat segera di laksanakan dan selesai tepat waktu.;
2. Peningkatan kualitas aparatur Perhubungan;
3. Berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pembuatan dokumen – dokumen laporan yang mendukung penilai kinerja OPD seperti Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD sehingga penilaian akuntabilitas OPD semakin membaik.
4. Akan berusaha mengoptimalkan dan segera menindaklanjuti setiap temuan – temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan BPK maupun Inspektorat terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.